

PENYUSUNAN ASPEK ORGANISASIONAL PENGELOLA POLDER STUDI KASUS: KALI BANGER, KOTA SEMARANG

DEVELOPING ORGANIZATIONAL ASPECTS OF POLDER INSTITUTION CASE STUDY: BANGER RIVER, SEMARANG

Nanang Rianto

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi dan Lingkungan
Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum, Jalan Sapta Taruna Raya No. 26
Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan
Pos-el: nanang.rianto@gmail.com

ABSTRACT

This qualitative research about composing the organizational aspect of polder board used case study method. Findings show that the suitable organizational form for Banger Polder System is a board that: 1) reflects the side who give direction; 2) reflects the responsibility to both internally (community) and externally (City Major); 3) involve the internal and external stakeholders for operational and maintenance tasks; 4) the capacity and composition of the member organization (board direction) reflects the stakeholders support and interest related to operational and maintenance tasks.

Keywords: *Polder system, Institution, Organizational aspects, Banger*

ABSTRAK

Penelitian tentang penyusunan aspek organisasional pengelola polder ini berjenis kualitatif dan menggunakan metode studi kasus. Temuan yang didapat dari penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi pengelola Sistem Polder Banger sebaiknya merupakan 1) pencerminan adanya pihak yang menentukan arah dan kebijakan organisasi; 2) pencerminan pertanggungjawaban lembaga, baik secara internal (kepada masyarakat) maupun eksternal (Pimpinan daerah); 3) pelibatan pihak eksternal dan internal terkait pemeliharaan dan operasional Sistem Polder Banger; 4) Kriteria kapasitas dan komposisi jumlah anggota organisasi Badan Pengarah BP2B Sima yang merupakan pencerminan tingkat kepentingan dan dukungan pelibatan pihak eksternal dan internal terkait pemeliharaan dan operasional Sistem Polder Banger.

Kata kunci: Sistem Polder, Kelembagaan, Aspek organisasi, Banger

PENDAHULUAN

Banjir telah menjadi permasalahan yang hampir rutin dihadapi oleh beberapa kota besar di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama yang berada di pesisir dan terletak dalam Daerah Aliran Sungai yang besar. Lebih jauh, banjir yang terjadi di Semarang secara lebih terperinci disebabkan oleh 3 (tiga) permasalahan utama, yaitu:¹

1. Fenomena alam: Hujan setempat, debit DAS hulu, pasang surut air laut (naiknya muka air laut sebagai dampak pencairan es di Kutub Utara dan Selatan akibat pemanasan global), dan gejala penurunan elevasi tanah (*land subsidence*)
2. Kondisi alam geografis, topografi, perubahan dimensi sungai, penyempitan, *slope*, *meandering*, pendangkalan karena sedimen-

tasi, *back water* (dalam istilah lokal sering disebut *rob*) pasang surut dan sebagainya

3. Aktivitas manusia: pengelolaan operasionalisasi dan pemeliharaan (OP) yang tidak memadai termasuk dalam kegiatan *artificial* yang dapat mengantisipasi sesaat (antara lain stasiun pompa), perubahan tata ruang, tata guna lahan (termasuk proses konsolidasi tanah di area pesisir), tata olah lahan (termasuk pengambilan air tanah berlebihan yang tidakimbang dengan kemampuan pengisian air tanah).

Permasalahan banjir di Kota Semarang telah mencapai kondisi yang memprihatinkan karena menyebabkan terhambatnya berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Banjir yang terjadi di kawasan Bandara Ahmad Yani telah menghambat lalu lintas penerbangan. Demikian pula banjir di bagian timur dan barat Kota Semarang telah menghambat lalu lintas masuk dan ke luar Kota Semarang dari kedua arah tersebut. Banjir yang terjadi di beberapa bagian pusat kota, seperti di Kawasan Johar, Pelabuhan Tanjung Emas, dan beberapa kawasan permukiman juga menghambat kegiatan ekonomi dan sosial di kawasan tersebut.

Di antara berbagai sistem penanganan banjir, Sistem Polder telah dianggap sebagai salah satu solusi struktural yang dipilih dan menjadi prioritas untuk diimplementasikan di Kota Semarang. Pembangunan sistem polder di Semarang diawali dengan ditandatanganinya beberapa perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Kerajaan Belanda, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kota Semarang.

Sistem Polder adalah suatu cara penanganan banjir dengan bangunan fisik yang meliputi sistem drainase, kolam retensi, tanggul yang mengelilingi kawasan, serta pompa dan pintu air sebagai satu kesatuan pengelolaan tata air tak terpisahkan. Sistem Polder yang bertujuan untuk mengendalikan banjir perkotaan secara terpadu merupakan sistem pengendalian banjir yang telah berhasil diterapkan di Belanda dan Singapura.

Sistem polder memerlukan kelengkapan beberapa sarana fisik, antara lain saluran air, kanal, tampungan memanjang, waduk, tanggul dan pompa.

Keseluruhan komponen sistem tersebut merupakan satu sistem yang terpadu dan dirancang sesuai dengan lokasi dan permasalahan yang dihadapi. Di dalam operasional pelaksanaannya, Sistem Polder menuntut dukungan-komplementer perihal aspek kelembagaan yang meliputi organisasi, pembiayaan, legal, dan sosial serta kebijakan, demi kesinambungan operasional dan pemeliharaannya. Untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan Sistem Polder, diperlukan keterlibatan seluruh *stakeholders*, termasuk masyarakat bertempat tinggal di wilayah sistem polder terkait.

Secara umum, telah dibuat panduan kelembagaan polder perkotaan (*Urban Polder Guidelines, Volume 2: Institutional Aspects*). Walau demikian, para pemangku kepentingan merasa panduan tersebut kurang operasional pada tataran praktis. Peran kelembagaan masyarakat yang tinggal di dalam wilayah sistem polder sangat penting dalam menjamin keberlanjutan program sistem polder perkotaan. Melalui suatu kelembagaan yang jelas dan tepat, masyarakat dapat dilibatkan di dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan operasional polder secara menerus dan berkelanjutan. Sebagai proyek percontohan, kelembagaan pengelola sistem polder belum pernah ada atau dibentuk, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimanakah bentuk penyelenggaraan aspek organisasi kelembagaan pengelola sistem polder yang dapat diterapkan di Banger?. Karena beberapa keterbatasan, tulisan ini akan difokuskan pada aspek organisasional dari kelembagaan pengelola sistem polder Banger.

Tulisan ini secara keseluruhan bertujuan untuk memformulasikan model penyelenggaraan aspek organisasional kelembagaan pengelola sistem polder berdasar kasus sistem Polder di Kota Semarang. Penelitian ini akan menjadi masukan (*input*) dalam menyempurnakan aspek organisasional pada *Urban Polder Guidelines, Volume 2: Institutional Aspects*.

Menurut Dahuri,² et al (1996), secara umum kelembagaan terdiri dari tiga aspek, yaitu (1) aparatur yang bekerja di lembaga tersebut; (2) fasilitas ruang, peralatan dan bahan serta fasilitas lainnya untuk mengoperasikan lembaga; dan (3) dana operasional untuk membiayai kegiatan lembaga tersebut. Sementara itu, pelembagaan nilai-nilai adalah memasyarakatkan hasil-hasil

yang dikerjakan oleh lembaga tersebut kepada masyarakat atau pengguna jasa lembaga tersebut. Nilai-nilai yang dilembagakan dapat berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, tata ruang, pedoman perencanaan, dan bentuk-bentuk lainnya yang telah dihasilkan oleh lembaga tersebut.

Sementara itu, menurut Israel,³ konsep umum mengenai lembaga meliputi apa yang ada pada tingkat lokal atau masyarakat, unit manajemen proyek, badan, aparatus, departemen-departemen di pemerintah maupun milik swasta. Kelembagaan lebih dipandang sebagai suatu manajemen dan keterkaitan antara sumber daya manusia, keuangan dan hubungan atau sistem kerja antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya.

Hasil yang dapat diperoleh dari pengembangan kelembagaan adalah mekanisme kegiatan yang teratur dan saling mendukung (terkoordinasi) yang pada akhirnya memberikan situasi dan kondisi yang kondusif dalam pemberian pelayanan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat

Merangkum dari berbagai pengertian yang dikemukakan sebelumnya maka yang dimaksud kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antarmanusia atau antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma, kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku sosial serta insentif untuk bekerja sama dan mencapai tujuan bersama.

Dari pengertian tersebut dapat dilihat bahwa salah satu elemen penting kelembagaan adalah organisasi. Menurut Jensen⁴ dalam tulisannya yang berjudul *Foundations of Organizational Strategy: Preface and Introduction*, terdapat empat elemen penting dalam organisasi kekinian, yaitu:

1. *The nature of human beings and their behavior*
Sisi rasional tingkah laku manusia yang inkonsisten saat mengalami kondisi tertentu;
2. *The costs of transferring information among agents*

Hal ini kurang lebih bermakna mengenai penempatan hak untuk mengambil keputusan yang spesifik kepada individu yang memiliki pengetahuan tentang hal itu;

3. *The agency costs generated by cooperative behavior among individuals*

Sifat bekerja sama antarindividu yang ada dalam organisasi merupakan simalakama potensi. Di satu sisi dapat terjalin kerja sama dan di sisi lain dapat terjadi konflik. Diperlukan mekanisme pembatasan konflik kepentingan antaranggota organisasi;

4. *The organizational rules of the game*

Sistem aturan yang mengikat dalam organisasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena dapat membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna-makna yang bersumber pada pengalaman individu, nilai-nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu).⁵

Metode penelitian menggunakan penelitian studi kasus. Metode ini digunakan karena menempatkan objek Polder Banger sebagai kasus penelitian yang memiliki kekhasan yang bernilai tinggi sehingga perlu diteliti. Dengan menempatkan Polder Banger sebagai kasus, maka dapat dilakukan eksplorasi pembelajaran yang dapat dimanfaatkan untuk dipergunakan sebagai model di dalam penanganan banjir dan rob pada kawasan-kawasan dengan permasalahan yang sama.

Untuk memenuhi kebutuhan data yang beranekaragam, penelitian kualitatif menggunakan berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara individual, wawancara kelompok, penelitian dokumen dan arsip serta penelitian lapangan.

Lokasi penelitian difokuskan di Kota Semarang, khususnya kawasan Kali Banger di Kecamatan Semarang Timur. Pemilihan lokasi di tempat ini karena kompleksitasnya sebagai lokasi pertama dari implementasi Sistem Polder yang dilakukan oleh pemangku kepentingan lintas

sektor mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan masyarakat. Waktu kajian dilakukan dalam rentang waktu 2 tahun yang dimulai sejak tahun 2009 hingga 2010. Di rentang waktu tersebut, penelitian lapangan menghabiskan waktu sekitar 6 bulan.

Unit observasi penelitian ini adalah beberapa pihak utama yang dianggap mampu dan relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara dilakukan terhadap embrio kelembagaan polder (Badan Pengelola Polder Banger Schieland-Semarang), pihak Pemerintah Kota Semarang seperti Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sumber Daya Mineral (Dinas PSDA dan ESDM).

Secara umum, proses penelitian ini mengikuti proses yang dijelaskan oleh Yin,⁶ Creswell,⁷ bahwa pada dasarnya tahapan-tahapan proses metode penelitian studi kasus adalah sebagai berikut:

1. *Define and Design*

Tahapan ini adalah kegiatan kajian teori untuk menentukan kasus dan membangun protokol penelitian sebagai arahan data yang harus dikumpulkan.

2. *Prepare, Collect, and Analyze*

Tahapan ini adalah kegiatan pengumpulan data dan analisis untuk menjelaskan kasus yang diteliti.

3. *Analyze and Conclude*

Tahapan ini merupakan kegiatan mengkaji secara teoretis kasus yang diteliti dan merumuskan kesimpulan.

Analisis dalam penelitian ini menggunakan metode analisis tematik. Metode analisis tematik adalah metode yang dikembangkan di dalam penelitian-penelitian etnografi dengan menggunakan kecenderungan pembentukan pola-pola tertentu terhadap data dan informasi yang diperoleh.⁸ Penelitian etnografi bersifat sangat lokal dan fokus mendalam atau apa yang disebut Gertz sebagai "*thick description*". Penelitian ini memang masih jauh bila dibandingkan dengan definisi orientalis yang sangat terkenal di kalangan peneliti etnografi Indonesia. Namun, hanya ingin menunjukkan bahwa analisis data tematik bisa digunakan untuk membedah karakteristik

data etnografi yang sangat beragam bentuk dan polanya.

Pola-pola tersebut digunakan untuk membangun tema dan subtema tertentu hingga pada akhirnya peneliti mampu menentukan tema utama yang didukung oleh fakta hasil pengumpulan data di lapangan. Secara umum, proses metode analisis tematik ini dilakukan dengan empat tahapan kegiatan sebagai berikut:⁸

1. Tahap identifikasi: ketika data primer dan sekunder yang telah terkumpul melalui studi literatur, observasi, dan wawancara kemudian diidentifikasi berdasarkan pokok-pokok permasalahannya. Pada tahap ini dilakukan pembersihan, terutama terhadap data yang terjaring yang tidak sesuai dengan kebutuhan (*data cleaning*).
2. Tahap kategorisasi: diterapkan pada saat data yang sudah teridentifikasi, kemudian dikelompok-kelompokkan antara satu dengan yang lain.
3. Tahap interpretasi: diterapkan ketika data yang sudah dikategorisasi kemudian dilakukan pengaitan antara satu dengan lain untuk selanjutnya dilakukan interpretasi. Tahap interpretasi ini dilakukan terhadap data serta mengaitkannya dengan kerangka teori sehingga dapat dipahami fenomena aspek organisasionalnya.
4. Tahap penarikan kesimpulan (sementara): digunakan ketika data yang sudah diinterpretasi, disimpulkan, lalu disusun rekomendasi perbaikan model kelembagaan pengelolaan polder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Kawasan dan Sistem Polder Banger

Nama Polder Banger itu sendiri diambil dari nama saluran drainase primer di area tersebut, yaitu Kali Banger. Adapun batas area polder Banger adalah pada sebelah utara: Jalan Arteri Utara (Jalan tol lingkar luar); sebelah Timur: Banjir Kanal Timur (BKT); sebelah Selatan: Jalan Brigjen Katamso; dan sebelah Barat: Jalan Ronggowarsito. Area polder Banger meliputi Kecamatan Semarang Timur seluas 530 ha dengan penduduk sekitar 84.000 jiwa.

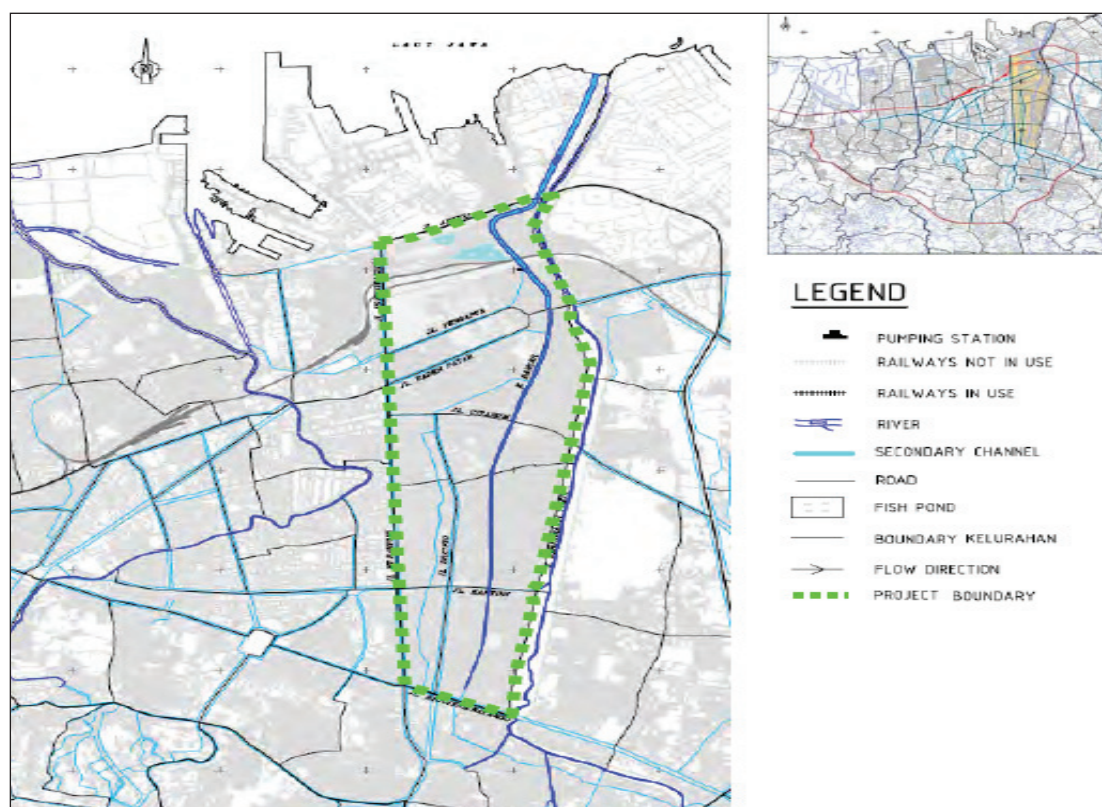
Kali Banger mengalir dari selatan ke utara, langsung menuju laut. Panjang Kali Banger 5,250 m, dengan lebar di bagian hulu 10 m dan di bagian hilir sampai dengan 30 m. Keseluruhan area Kali Banger meliputi luasan 11 ha. Ketinggian permukaan air Kali Banger sebelah utara tergantung pasang surut air laut. Pada saat pasang ketinggian permukaan mencapai +0.50 m dpa, sedangkan pada waktu surut sekitar -0.50 m dpa. Karena itu, banjir terjadi karena dua mekanisme, yaitu limpasan air yang meluap dari tanggul Kali Banger ketika pasang tinggi dan tertutupnya muara Kali Banger sehingga curah hujan yang turun tidak teralirkan. Di sebelah selatan, ketinggian permukaan air Kali Banger tidak terpengaruh pasang surut. Ketinggiannya sekitar +1.00 m dpa, lebih tinggi daripada pasang tertinggi. Genangan yang terjadi di sebelah selatan lebih banyak disebabkan curah hujan yang tinggi. Kali Banger mengalami sedimentasi akibat sedimen bawaan air laut dan dari jalan di kiri kanan kali yang tidak diperkeras.

Ketinggian permukaan tanah di area Polder Banger termasuk sangat rendah dengan keting-

gian di antara -0.50 dpa sampai dengan +0.50 dpa. Dengan kata lain, pada saat pasang air laut sebagian area Polder Banger dipastikan tergenang. Hampir setiap hari terjadi banjir dengan frekuensi yang semakin tinggi. Jalan Ronggowarsito sebelah utara bahkan dikenal sebagai genangan abadi. Permukaan tanah di sekitar Banger mengalami penurunan signifikan dengan rata-rata 9 cm/tahun. Penurunan tinggi permukaan tanah (*land subsidence*) dapat dilihat dengan jelas pada beberapa bangunan rumah yang tidak ditinggikan sementara jalan di depan rumah tersebut ditinggikan, secara berkala.

Dengan kondisi penurunan permukaan tanah dan naiknya permukaan laut, bila tidak ditangani dengan tepat, dalam 10–20 tahun lagi, 85% dari area Banger akan mengalami banjir permanen dan aset-aset yang berada di dalamnya dimungkinkan hilang. Selain permukiman, dalam area Banger terdapat jaringan rel kereta api, jaringan distribusi BBM milik Pertamina, gudang senjata yang sudah terendam, dan industri-industri kecil.

Kawasan Banger merupakan kawasan yang berada di sekitar Kali Banger di Kota Semarang.



Gambar 1. Kawasan Sistem Polder Banger

Kawasan ini terdiri atas sepuluh kelurahan di Kecamatan Semarang Tengah, meliputi luas lebih kurang 550 ha. Jumlah kepala keluarga yang tinggal di kawasan tersebut lebih kurang 21.160 KK, dengan jumlah penduduk yang tinggal di kawasan tersebut lebih kurang 84.000 jiwa. Untuk lebih jelasnya, perhatikan Tabel 1.

Polder didefinisikan sebagai area yang mengalami pemulihan (*reclaimed*), umumnya berparas air tanah (*groundwater table*) yang tinggi, melalui pengisolasian terhadap rezim hidrologi sekelilingnya sehingga level air (permukaan serta air tanah) mampu dikendalikan.¹⁰

Sistem polder merupakan alternatif rekayasa yang sesuai serta efektif guna mengendalikan banjir dan mendukung pembangunan rural atau area urban yang terletak di zona dataran banjir (*flood prone*).

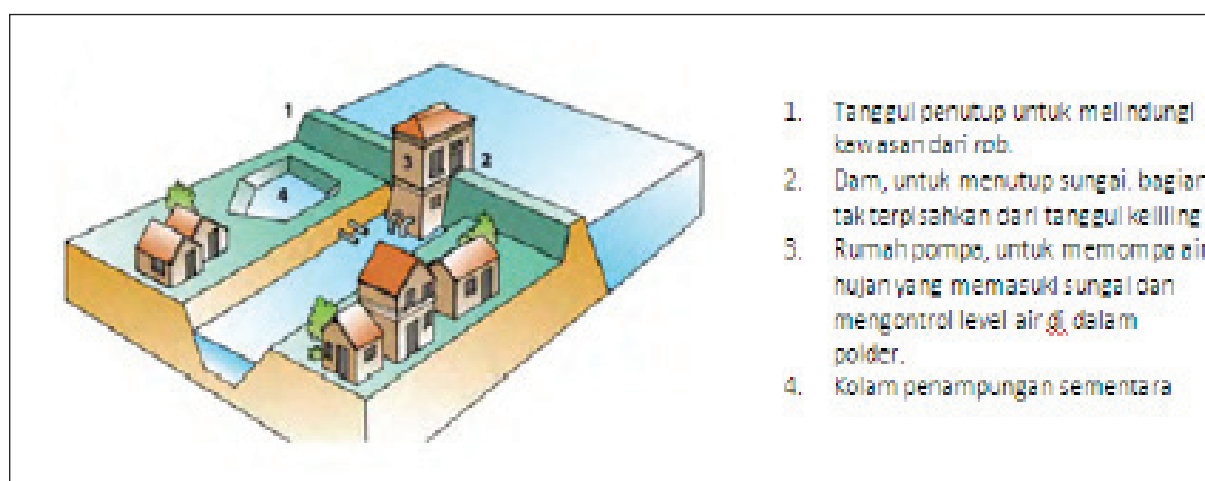
Keberhasilan pembangunan serta pengelolaan polder membutuhkan keterlibatan komunitas; sustainabilitas manajemen sistem pengelolaan air dan proteksi banjir yang hanya dapat dicapai bilamana terdapat peranserta para mitra atau komunitas yang bermukim di dalam polder

Dalam periode kering dan normal, air dari kanal-kanal penampungan atau kanal pembuangan

Tabel 1. Kelurahan dan Jumlah keluarga

No.	Kelurahan	Jumlah Keluarga
1.	Kemijen	3,382
2.	Rejomulyo	1,003
3.	Mlatiharjo	1,548
4.	Mlatibaru	2,087
5.	Bugangan	2,342
6.	Kebon Agung	1,224
7.	Sarirejo	2,603
8.	Rejosari	4,659
9.	Karangturi	904
10.	Karang Tempel	1,408
	Total	21,160

Sumber: Sebranmas⁹ (2009)



Sumber : Mondeel dan Budinetto,¹¹ 2010

Gambar 2. Elemen-elemen Sistem Polder

di alirkan ke polder untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Pada kondisi tingkat curah hujan yang tinggi, yang menyebabkan air meluap di drainase di kawasan polder, air segera di alirkan ke kanal dan kolam penampungan. Selanjutnya air disalurkan dengan dorongan pompa air yang berkapasitas besar ke sungai atau kanal pembuangan ke laut.

Secara lebih terperinci, kelengkapan sarana fisik sistem polder, antara lain adalah saluran air, kanal, kolam penampungan memanjang, waduk, tanggul, dan pompa.

1. Saluran air, kanal, tampungan memanjang dan waduk. Saluran air atau tampungan memanjang dan waduk dibangun sebagai sarana untuk mengatur penyaluran air ketika elevasi air di titik pembuangan lebih tinggi dari elevasi saluran di dalam kawasan.
2. Tanggul. Tanggul dibuat di sekeliling kawasan guna mencegah masuknya air ke dalam kawasan, baik yang berasal dari luapan sungai, limpasan permukaan atau akibat naiknya muka air laut. Sebaliknya, dengan adanya tanggul, air yang ada di dalam kawasan tidak dapat keluar. Tanggul dibuat dengan ukuran yang lebar, besar, dan tinggi serta dapat difungsikan sebagai jalan.
3. Pompa Air. Pompa air berfungsi mengeringkan air pada badan air, yang bekerja secara otomatis apabila volume/elevasi air melebihi nilai perencanaan.

Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada Gambar 2.

Kajian Aspek Organisasional Kelembagaan Pengelola Sistem Polder

Secara tentatif, di kawasan polder sudah ada embrio kelembagaan yang nantinya akan mengelola pengelola sistem polder Banger.

Embrio kelembagaan tersebut dibentuk oleh Walikota Semarang dan diberi nama Badan Pengelola Polder Banger-Schieland-Semarang (BP2B SIMA). Walau demikian, BP2B SIMA masih membutuhkan banyak masukan terkait aspek organisasional di tataran operasionalnya.

Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan lapangan dan pengkajian terhadap data sekunder, dapat dirumuskan bahwa dari aspek organisasi,

hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa organisasi kelembagaan pemeliharaan dan operasional polder, khususnya pada BP2B Sima yang kelak akan mengelola Sistem Polder Banger, harus mencerminkan organisasi yang terbuka secara internal dan eksternal.

Secara internal, organisasi BP2B Sima harus mencerminkan sebagai organisasi yang terbuka untuk mengadopsi dan mengakomodasi kepentingan masyarakat yang tinggal di Kawasan Polder Banger. Sebagai sebuah sistem yang kelak menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat di Kawasan Polder Banger, pemeliharaan dan operasionalisasi Sistem Polder Banger harus bersifat melibatkan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan Polder Banger. Pelibatan masyarakat diperlukan sebagai upaya untuk membangun dan mengembangkan kepedulian masyarakat terhadap sistem yang menopang kehidupan mereka. Kepedulian masyarakat dibutuhkan agar pelaksanaan program dan kegiatan pemeliharaan dan operasional sistem sehari-hari mendapatkan dukungan dan bantuan secara langsung masyarakat. Pelibatan masyarakat ini harus tercermin di dalam aspek organisasi BP2B Sima.

Sementara itu, secara eksternal, BP2B Sima harus mengakomodasikan dukungan pihak-pihak yang terkait secara tidak langsung dalam pemeliharaan dan operasionalisasi Sistem Polder Banger. Pihak-pihak tersebut adalah mereka yang berasal dari luar lingkungan Kawasan Polder Banger yang mampu memberikan bantuan dan dukungan terhadap keberlangsungan program dan kegiatan pemeliharaan dan operasionalisasi Sistem Polder Banger. Bantuan dan dukungan tersebut dibutuhkan mengingat Sistem Polder merupakan sebuah sistem yang dirancang dengan keahlian tertentu dan terkait dengan sistem lain yang lebih luas sehingga membutuhkan keterlibatan keahlian tertentu dan dukungan kebijakan dari pemerintah.

Rumusan tentang kondisi BP2B Sima mencerminkan organisasi yang terbuka secara internal dan eksternal. Hal itu diambil dari beberapa subtema yang muncul dan diperoleh dari pengumpulan data. Subtema pertama adalah bahwa struktur organisasi BP2B Sima mencerminkan adanya pihak yang menentukan arah dan kebijakan lembaga dan pihak yang menjalankannya.

Sementara itu, subtema yang kedua berkaitan dengan struktur organisasi BP2B Sima yang telah mencerminkan pertanggungjawaban lembaga, baik secara internal (masyarakat) maupun eksternal (Walikota Semarang). Subtema ketiga juga mendukung rumusan tersebut, yaitu bahwa struktur organisasi BP2B Sima mencerminkan pelibatan pihak eksternal dan internal terkait dengan pemeliharaan dan operasional Sistem Polder Banger.

Demikian pula subtema yang terakhir, yaitu bahwa kriteria kapasitas dan komposisi jumlah anggota organisasi Badan Pengarah BP2B Sima mencerminkan tingkat kepentingan dan dukungan pelibatan pihak eksternal dan internal terkait pemeliharaan dan operasional Sistem Polder Banger.

Dari beberapa subtema tersebut, dapat dilihat bahwa kelembagaan pemeliharaan dan operasional sistem polder, khususnya yang terdapat di BP2B Sima, menunjukkan adanya ciri-ciri utama tentang adanya pihak internal dan eksternal yang perlu diakomodasikan ke dalam organisasi.

Seperti terlihat pada diagram tematik di bawah, dapat dilihat bahwa keterlibatan hampir semua pemangku kepentingan menjadi yang utama. Seperti dinyatakan Israel³ bahwa salah satu inti kelembagaan adalah hubungan atau sistem kerja antara suatu lembaga dengan lembaga lainnya, keterlibatan pihak internal (masyarakat Banger) dan pihak eksternal. Hasil yang dapat diperoleh dari pengembangan kelembagaan dengan model keterwakilan pemangku kepentingan tersebut nantinya adalah mekanisme kegiatan yang teratur dan saling mendukung (terkoordinasi). Hal tersebut pada akhirnya memberikan situasi dan kondisi yang kondusif dalam pemberian pelayanan dan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Subtema lain yang penting dalam diagram tematik di atas adalah mengenai struktur organisasi, struktur organisasi yang mencerminkan pembagian kewenangan antara pihak manajerial dan pihak pelaksana harian. Hal tersebut dikatakan Jensen (1988) penting dalam rangka kecepatan pengambilan keputusan yang spesifik. pelaksana harian misalnya, bisa langsung mengambil keputusan spesifik untuk hal tertentu

terkait pengelolaan pompa polder tanpa perlu melakukan konsultasi ke pihak manajerial. Hal tersebutlah yang dimaksud Jensen sebagai *The costs of transferring information among agents*.

Kriteria

Struktur organisasi yang mencerminkan tanggung jawab kepada pihak masyarakat dan Walikota Semarang dapat dilihat sebagai urgensi akan pentingnya aturan internal organisasi. Aturan internal yang dalam bahasan Jensen disebut sebagai *the rule of the game* sangat krusial untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas organisasi.

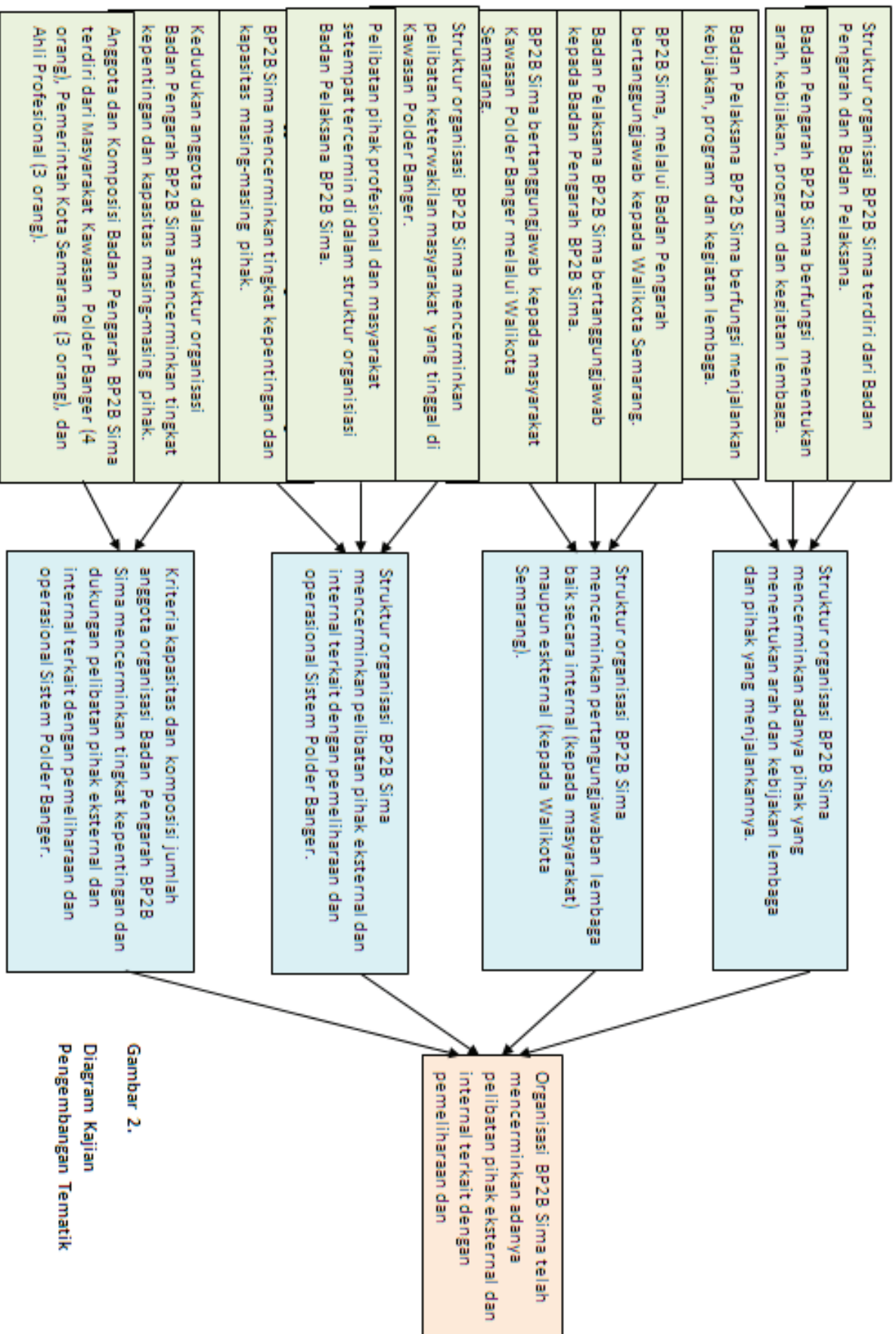
KESIMPULAN

Dalam penelitian ini bisa disimpulkan bahwa dalam menyusun organisasi pengelola sistem polder agar berjalan seperti yang diharapkan perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) pencerminan adanya pihak yang menentukan arah dan kebijakan lembaga; 2) pencerminan pertanggungjawaban lembaga, baik secara internal (kepada masyarakat) maupun eksternal (Pimpinan daerah); 3) pelibatan pihak eksternal dan internal terkait pemeliharaan dan operasional Sistem Polder Banger; 4) Kriteria kapasitas dan komposisi jumlah anggota organisasi Badan Pengarah BP2B Sima, merupakan pencerminan tingkat kepentingan dan dukungan pelibatan pihak eksternal dan internal terkait pemeliharaan dan operasional Sistem Polder Banger.

DAFTAR PUSTAKA

- ¹Anonim. 2007. *Laporan Akhir Penyusunan Dokumen Master Plan Drainase Kota Semarang*. Semarang: Bappeda Kota Semarang dan P.T. Tera Buana Manggala Jaya.
- ²Damanhuri, D. S. 1996. *Proyeksi Ekonomi '96 INDEF: Monopoli dan Distorsi Ekonomi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- ³Israel, A. 1990. *Pengembangan Kelembagaan: Pengalaman Proyek-proyek Bank Dunia*; Jakarta: LP3ES.
- ⁴Jensen, M. C. 1998. *Foundation of Organizational Strategy: Preface and Introduction*. MA, USA: Harvard University Press.
- ⁵Creswell, J. W. 2003. *Research Design. Qualitative, Quantitative And Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks, California: Sage Publications.

- ⁶Yin, R. K. 2009. *Case Study Research: Design and Methods (Fourth Edition)*. CA Newbury Park: Sage Publisher.
- ⁷Creswell, J. W. 2005. *Qualitative Inquiry And Research Design. Choosing Among Five Traditions (Second Edition)*. Thousand Oaks, California: Sage Publications,.
- ⁸Aronson, J. 1994. A Pragmatic View of Thematic Analysis. *The Qualitative Report*, 2: 1
- ⁹Anonim. 2009. *Laporan Hasil Pertemuan Tim Rob Sebranmas dengan Balai Sungai-Puslitbang Sumber Daya Air*, 12 Februari 2009. Jakarta: Puslitbang Sebranmas.
- ¹⁰Messner, F. and Volker Meyer. 2004. Flood Damage, Vulnerability and Risk Perception: Challenges For Flood Damage Research. Dalam: Jochen Schanze, Evzen Zeman, dan Jiri Marsalek (Ed): *Flood Risk Management: Hazards, Vulnerability and Mitigation Measures*. Springer, Dordrecht
- ¹¹Mondeel, H. and Hermono S Budinetro. 2010. *The Banger Polder in Semarang. Solo: Center for River Basin Organizations and Management*. Solo: Center for River Basin Organizations and Management.



Gambar 2.
Diagram Kajian
Pengembangan Tematik